

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat sebuah negara besar yang yang mempunyai pengaruh didunia, dengan segala kemajuan yang dimiliki, AS sangat mampu menancapkan peranan dan pengaruhnya. Siapa yang bisa menyangkal, sampai sekarang AS masih menjadi negara utama didunia dengan kekuatan ekonomi yang solid, walaupun telah diterpa krisis dan resesi ekonomi sejak tahun 2008 namun para pembuat kebijakan di Amerika Serikat seperti selalu mampu menemukan jalan untuk mempertahankan hegemoni ekonominya dan politiknya. Hegemoni merupakan cara yang diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *city states*) secara individual misalnya yang dilakukan oleh negara Athena dan Sparta terhadap negaranegara lain yang sejajar.<sup>1</sup>

Pada zaman sekarang hegemoni juga bisa diartikan sebagai sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara “pemimpin”. Dalam politik internasional dapat dilihat ketika adanya perang pengaruh pada perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan tunggal yang mampu menghegemonik dunia.

Namun pasca keruntuhan Uni soviet, tampaknya AS terus melakukan hegemoni dalam dinamika politik internasional. Dalam kebijakan luar negeri misalnya, AS selalu memperkuat sistim ini agar terus berlangsung. Banyak jalan yang bisa ditempuh oleh AS

---

<sup>1</sup> Nezar Patria, *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999)

untuk menyelesaikan apapun masalah yang menerpa, dengan kekuatan militer yang sangat besar. dan tangguh disertai peralatan militer yang canggih, selain itu banyak juga perusahaan bertaraf Multi Nasional yang bermarkas di AS, dan disertai kekuatan politik luar negerinya membuat eksistensi AS sebagai sebuah negara besar atau *superpower* tak tergoyahkan.

Dengan kekuatan yang dimilikinya, Amerika Serikat sangat berpengaruh di dalam konstelasi politik Internasional. Saking kuatnya pengaruh serta *bargaining position* yang dimilikinya, AS selalu bisa saja bertindak sesuai dengan kepentingannya. Salah satu buktinya adalah ketika AS dengan seenaknya bisa menginvasi sebuah negara yang berdaulat hanya gara-gara isu tentang senjata pemusnah massal yang terdapat di Irak. Bahkan setelah Irak pun jatuh, senjata tersebut tak jua di temukan.

Amerika selalu meng-klaim dirinya sebagai “*Polisi Dunia* “, yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dunia, mau tidak mau Amerika terus berupaya mengontrol organisasi terbesar yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi yang didirikan sejak perang duni pertama ini merupakan organisasi yang beranggotakan semua Negara yang telah diakui kedaulatannya.

Bagaimana dengan Negara-negara yang belum berdaulat seperti Palestina misalnya. Palestina mempunyai sejarah konflik yang cukup panjang, terutama dengan Israel, yang tidak mau mengakui Palestina merupakan sebuah Negara. Israel merupakan sekutu terdekat Amerika. Palestina ingin masuk PBB agar diakui kedaulatnnya oleh dunia. Amerika tentu saja menentang hal tersebut, karena di tanah Palestina-lah Israel berdiri.

Sebagai negara *super power* yang memiliki *bargaining position* yang kuat, Amerika Serikat bahkan menempatkan dirinya sebagai tonggak demokrasi dan sebagai polisi dunia yang memiliki misi sebagai pemelihara keteraturan dunia. Amerika Serikat menamakan dirinya sendiri sebagai,

*“the champion of democracy”*, *“the guardian of democracy”* dengan tujuan menegakkan pelaksanaan demokrasi seluruh dunia yang kerap kali dilakukan dengan tindakan politik luar negeri, dari sekedar kecaman diplomatik hingga berwujud tindakan militer.<sup>2</sup>

Konflik di Timur Tengah misalnya, juga tidak luput dari tangan Amerika Serikat dengan alasan keamanan dunia menggempur negara diktator Irak yang diisukan memiliki senjata pemusnah massal, Afghanistan terakhir bahkan AS mengobrak - abrik Pakistan yang disebut negara sarang teroris. AS tidak segan-segan mengintervensi negara lain secara militer melalui NATO yang di legitimasi oleh PBB. Bahkan dalam konflik panjang Palestina-Israel AS bersedia memfasilitasi, sebagai mediator-donatur perdamaian kedua negara walaupun dengan kebijakan-kebijakan yang ambigu.

Kelihatannya AS berusaha keras menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina dengan memprakarsai perundingan-perundingan jalan damai antara Israel dan Palestina. Perundingan seperti Camp David (1978), perundingan OSLO (1993), Wye River (1998), Peace Road Map (2002) juga perundingan Annapolis (2007) adalah upaya-upaya yang dilakukan AS dalam proses perdamaian Israel-Palestina yang pada akhirnya mengalami jalan buntu karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel sendiri dan AS sebagai sekutu utama Israel tidak bisa berbuat apa-apa.

Campur tangan AS dalam penyelesaian konflik Israel- Palestina sama sekali tidak merubah keadaan, janji janji AS menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina malah dinodai dengan kebijakan standar ganda AS sendiri. Dalam perjanjian Annapolis (2007) misalnya, AS menjanjikan kemerdekaan berdaulat kepada Palestina dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel melalui gencatan senjata. Faktanya, pada tahun yang

---

<sup>2</sup> Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: membongkar politik standar ganda AS*, Yogyakarta: bigraf,2000, hal 211

sama AS tetap memberikan bantuan secara militer dan diplomatik kepada Israel yang di gunakan untuk menggempur Palestina, yang di tandatangi langsung oleh Deputy Menlu era Presiden Bush, Nicholas Burns-MoU antara AS-Israel yang berisi perjanjian bahwa AS akan, memberi bantuan militer sebesar 3 milyar dollar pertahun dalam jangka waktu 10 tahun yang artinya, ada peningkatan bantuan sebesar 25% dari tahun sebelumnya.<sup>3</sup>

Perjanjian tersebut ditandatangani di kantor Kementrian Luar Negeri Israel. Dan AS, demi menyelamatkan Israel, menjalin diplomasi dengan musuh-musuh Israel, Mesir dan Yordania; mereka diberi bantuan dana sebagai imbalan dari kesediaan menjalin perdamaian dengan Israel. Belum lagi dana yang harus dikeluarkan AS untuk membangun pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah yang semuanya bertujuan untuk menjaga Israel.

AS menciptakan citranya seperti begitu persisten ingin menciptakan perdamaian di Timur Tengah dengan membantu berdirinya dan mendanai finansial PLO yang berdiri pada 1964. Oktober 1974 PLO ditunjuk oleh Liga Arab sebagai satu-satunya wakil rakyat palestina PBB dalam KTT Arab di Kairo.<sup>4</sup> PLO mendapatkan haknya duduk di Majelis Umum PBB sebagai *observer* yang memiliki hak bicara tapi tidak punya hak suara.

AS melalui presiden Jimmy Carter memprakarsai perundingan Camp David pada tahun 1978 dimana Mesir dan Israel didudukan pada kursi yang sama. Melalui perundingan ini AS dan Israel akhirnya mampu menundukkan Mesir untuk tidak lagi mengklaim jalur Gaza. Perundingan ini banyak dikecam oleh bangsa Arab sebagai pendukung PLO, dengan tunduknya Mesir itu berarti berkurang negara yang memperjuangkan pembebasan. Palestina. Sepak terjang presiden Carter di teruskan oleh presiden Clinton dengan mengadakan

---

<sup>3</sup> Analisis kebijakan luar negeri AS terhadap Israel di era Obama dalam "<http://dinasulaeman.wordpress.com/2009/09/26/analisis-kebijakan-luar-negeri-as-terhadapisrael-pada-era-obama/#comments> diakses tanggal 1 desember 2012.

<sup>4</sup>Dra.Hennawati,M.A. *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal 138

perundingan OSLO pada 13 September 1993 di Washington DC, dimana akhirnya Israel dan Palestina sama-sama mengakui eksistensinya masing-masing dengan batas wilayah dikembalikan sesuai peta wilayah tahun 1997. Berdasarkan kesepakatan OSLO, Itzhak Rabin menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Gaza.

Sekarang masa pemerintahan presiden Obama yang memilih diam dan membiarkan Israel berbuat sendiri terhadap Palestina. Presiden Obama hanya mengomentari konflik Palestina dan Israel hanya melalui kecaman. Sikap diam AS dan kelelahan karena konflik berkepanjangan yang dialami Palestina membuat negara tersebut pada akhirnya menyadari pentingnya Palestina untuk bergabung dalam organisasi internasional agar keberadaannya diakui dunia, maka Palestina mulai bermanuver untuk bergabung dalam PBB. Palestina sadar bahwa adu persenjataan dengan Israel tidak cukup untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Sejak diserahkannya konflik Palestina-Israel ke PBB tahun 1947 terjadi adu senjata yang massive antara kedua belah pihak yang belum terselesaikan hingga sekarang. Palestina mengambil langkah memperjuangkan pengakuan keberadaan dan keabsahan statusnya sebagai negara berdaulat dari dunia internasional.

Salah satu perjuangan Palestina untuk mendapat dukungan dunia adalah dengan berusaha menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan duduk di PBB maka secara *De Facto* dan *De Jure* Palestina diakui dunia sebagai Negara berdaulat. Selain itu Palestina juga mempunyai hak bicara dan hak suara di PBB. Namun tampaknya perjuangan Palestina belum tercapai karena selalu di halanghalangi Amerika yang mempunyai hak veto akan suatu hal yang tidak sesuai dengan kepentingannya di PBB.

Tidak adanya dukungan dari Amerika, tetap membuat Palestina berusaha untuk masuk dalam keanggotaan PBB. Palestina mengumumkan, pada hari Kamis pada 8 September 2011,

bahwa akan mendatangi kantor PBB bulan September untuk meminta pengakuan dari seluruh negara anggota bahwa Palestina telah merdeka dari penjajahan Israel pada 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.<sup>5</sup> Selanjutnya proses pengajuan anggota tetap Palestina dimulai pada tanggal 23 September 2011, ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dan menyerahkan surat yang mengatakan bahwa Palestina akan mengajukan permohonan sebagai anggota tetap PBB.

Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan tersebut, Sekjen akan mengirimkan permohonan itu ke DK PBB. Permohonan hanya bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat veto (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB. Proposal Palestina mendapat dukungan signifikan dari negara anggota PBB, termasuk oleh 6 dari 15 anggota DK PBB, di antaranya Cina, Rusia, Lebanon, India, Afrika Selatan dan Brasil.

Bangsa Palestina hanya menginginkan haknya sebagai negara yang merdeka dan mempunyai hak untuk menjadi anggota PBB. Keinginan Palestina tersebut mendapat dukungan penuh dari negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok. Tentunya Palestina mengharapkan dukungan negara-negara internasional, seperti OKI, Non Blok, dan hampir mayoritas mendukung Palestina. Namun memang belum semuanya mendukung, yang bisa saja mengganjal keanggotaan Palestina di PBB.

Palestina telah melalui serangkaian diplomasi yang begitu sulit dan panjang untuk mendapatkan status penuh dari PBB, lobi-lobi dilakukan sebagai usaha politik palestina kepada negara-negara yang tergabung dalam PBB dan juga kepada organisasi-organisasi internasional

---

<sup>5</sup>AS Bakal Veto Upaya Palestina Masuk PBB dalam <http://forum.kompas.com/internasional/4616-bakal-veto-upayapalestina-masuk-pbb.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2012

lainnya. Palestina tidak kenal lelah dalam mencari dukungan terutama di Dewan Keamanan PBB, melalui OKI palestina meminta secara khusus OKI berbicara kepada anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB yaitu, Turki, Siberia, Nigeria, Bosnia dan Herzegovina untuk memastikan dukungan 9 negara pendukung Palestina di PBB.

Pada tanggal 16 september 2011 presiden Abbas bertemu langsung dengan presiden Bosnia untuk meminta dukungan, Menteri Luar Negeri Bosnia Sven Alkalaj mengatakan kepada media di Sarajevo bahwa Abbas datang untuk melobi dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB, tetapi menegaskan Bosnia masih belum membuat keputusan untuk soal dukungarn ini. Walaupun pada akhirnya Bosnia memilih abstain.<sup>6</sup> Sedangkan Rusia, Lebanon, Brazil dan Afrika Selatan telah menyatakan dukungan penuh kepada Palestina melalui delegasi masing-masing.

Presiden Bolivia menegaskan dukungannya kepada Palestina seperti pidatonya dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 21 September, 2 hari sebelum Palestina resmi mengajukan permohonan kepada PBB. Presiden Bolivia Evo Morales mengecam Israel atas tindakan mereka menindas rakyat Palestina dan menyatakan dukungan kuat negaranya untuk pengakuan kenegaraan Palestina di PBB. “Bolivia tidak hanya mendukung pengakuan Palestina oleh PBB, posisi kami adalah untuk menyambut Palestina untuk PBB”.<sup>7</sup>

Tahap awal yang dilakukan oleh Palestina setelah pengajuan resminya ke PBB adalah bergabung dengan Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Keanggotaan Palestina di lembaga kebudayaan PBB itu, disepakati pada Senin tanggal 31 Oktober 2011 di Paris. Brazil, China, India, Libanon, Rusia dan Afrika Selatan telah secara terbuka

---

<sup>6</sup> ZA & Dunia” [htt.://zadandunia.blo-s.ot.com/2011/09/rusia-ilih-kenegaraan-palestina-di.html](http://zadandunia.blo-s.ot.com/2011/09/rusia-ilih-kenegaraan-palestina-di.html) di akses 1 Desember 2012

<sup>7</sup> “Ibid”

mendukung kasus Palestina itu. Dubes Palestina sebelumnya meminta pada Dewan Keamanan PBB untuk mengecam aksi balasan Israel yang diumumkan setelah keputusan UNESCO.<sup>8</sup>

Walaupun ada penentangan kuat dari Amerika Serikat dan Israel. Para pejabat Amerika, yang marah, mengatakan bahwa Amerika akan menghentikan bagian pendanaannya untuk UNESCO, yang berjumlah hampir seperempat dari seluruh anggaran badan kebudayaan tersebut. Amerika juga memperingatkan mengenai dampak besar kalau saja lembaga lain PBB mengikuti tindakan UNESCO.<sup>9</sup>

Amerika semakin geram, melihat usaha Palestina mendapatkan pengakuan dunia internasional semakin gigih dan terhitung tanggal 30 November 2012 PBB meningkatkan status palestina menjadi pengamat non negara, yang berarti Palestina tidak hanya memiliki hak bicara tetapi juga memiliki hak suara dan boleh terlibat dalam perundingan internasional, perjanjian internasional dan mempunyai hak untuk bergabung dalam organisasi-organisasi internasional yang dibawah oleh PBB. Dalam sidang Majelis Umum di markas besar PBB sehari sebelumnya, Palestina mendapatkan suara mayoritas, dari 193 negara anggota, 138 negara yang mendukung, 9 menolak dan 41 lainnya abstain.<sup>10</sup>

Lagi-lagi Amerika yang marah melihat keberhasilan diplomasi Palestina menyatakan ketidaksetujuannya melalui wakilnya di PBB, Susan Rice, mengecam tindakan PBB ; “Resolusi kontraproduktif telah terjadi hari ini, memberikan halangan baru atas upaya perdamaian”. Amerika kemudian menghukum Palestina dengan membekukan dana bantuan di Tepi Barat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>“Inggris, Prancis dan Kolombia Pastikan tak Dukung Palestina di DK PBB,” dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestinaisrael/11/11/04/lu4asj-inggrisprancisdan-kolombia-pastikan-tak-dukung-palestina-di-dk-pbb>, diakses tanggal 10 Oktober 2012.

<sup>9</sup>“Hizbullah Kecam Sikap AS Soal Palestina, Sebut AS Sebagai Negara Rasis,” dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/11/11/02/lu4d78-h-izbullah-kecam=sikap-as-soal-palestina-sebut-as-sebagai-negara-rasis>, diakses tanggal 10 Oktober 2012.

<sup>10</sup>“<http://internasional.rmol.co/read/2012/12/01/87787/Kemenangan-Palestina-Di-PBB-Kemunduran-Diplomasi-Amrik>” di akses 1 Desember 2012.

<sup>11</sup>“ Babak baru perjuangan Palestina dalam “<http://politik.kompasiana.com/2012/12/06/babak-baruperjuangan> -



Palestina meskipun berkeinginan untuk diakui statusnya sebagai negara berdaulat oleh seluruh negara didunia, bahkan dalam perkembangannya Palestina mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai cara dilakukan Amerika untuk menghambat Palestina menjadi anggota PBB.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang menjelaskan rencana Palestina untuk bergabung dengan PBB dan penolakan keras yang dilakukan oleh Amerika Serikat, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana upaya-upaya Amerika Serikat untuk menghambat bergabungnya Palestina ke dalam PBB sebelum menggunakan hak vetonya?

## **C. Kerangka Teoritis**

### **Konsep Power**

Morgenthau dan Thompson menjelaskan bahwa *power* dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap negara menggunakannya untuk mencapai berbagai hal seperti kebebasan, keamanan, kemakmuran, ataupun kekuasaan. Tujuan lainnya antara lain adalah agama, filosofi, ekonomi, ataupun bentuk sosial yang ideal. Untuk merealisasikan tujuannya tersebut maka tidak terlepas dari politik internasional yang ada dan *power* dibutuhkan.<sup>12</sup>

Menurut K.J Holsti , power adalah sebuah konsep multidemnsional yang terdiri dari:

---

*palestina-508714.html* diakses tanggal 1 Desember 2012.

<sup>12</sup>James E. Dougherty and Robert L Pfazgraff. Jr, "*Teori-Teori Hubungan Internasional*", terjemahan oleh M Amien Rais, Harwabto Dahlan, Tulus Warsito, 1996, hal 109.

1. Tindakan satu faktor mempengaruhi faktor yang lain.
2. Kemampuan yang digunakan untuk tujuan mempengaruhi faktor lain.
3. Tanggapan yang didapat. Power adalah *a means to an end* (alat untuk mencapai tujuan), dimana *power* merupakan sarana untuk mengaktualkan kepentingan suatu aktor terhadap aktor yang lain.

Intinya Holsti mendefinisikan *power* sebagai "*the general capacity of state to control the behavior of others*" (kemampuan umum suatu negara untuk mengontrol negara-negara lain).

Sedangkan menurut Theodore A Colombis dan James H Wolfe, power mempunyai tiga unsur utama yaitu:

- a. Unsur pertama adalah pengaruh (*influence*) yang di defenisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi oleh suatu negara untuk menjaga ataupun mengubah perilaku negara lain sesuai dengan persepsi atau keinginannya.
- b. Unsur kedua adalah kekuatan (*force*) yang didefinisikan sebagai ancaman eksplisit dengan menggunakan alat-alat paksa seperti militer atau ekonomi suatu negara terhadap negara lain untuk mencapai tujuan
- c. Unsur ketiga adalah kewenangan (*authority*) yang didefinisikan sebagai upaya menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar kehendaknya dapat tercapai.

Setiap negara memiliki sumber power yang berbeda-beda yang bisa secara efektif digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu namun tidak semua unsur power dapat secara efektif mengaktualisasikan setiap kepentingan dalam setiap situasi. Suatu aktor harus mengetahui unsur power yang ada sehingga bisa menggunakannya secara tepat dalam situasi tertentu.

Power adalah kemampuan mempengaruhi lingkungan dari suatu aktor yang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer tetapi juga faktor lain seperti ekonomi, politik, bisa juga teknologi.

Dengan faktor-faktor yang dimiliki suatu aktor bisa disimpulkan strata sosialnya dilingkungannya berada. Begitu juga dalam lingkup internasional, suatu aktor harus mempunyai faktor-faktor yang signifikan sebagai senjata untuk mempengaruhi keputusan atau aktor internasional lainnya.

Amerika Serikat adalah negara yang memiliki power kuat dimana kekuatan tersebut meletakkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang mempunyai pengaruh besar dalam setiap isu ataupun keputusan internasional. Hal ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu aktor elit internasional. Unsur pertama dari power adalah pengaruh (influence). Hal yang dilakukan Amerika Serikat adalah membuat pernyataan-pernyataan agar negara lain tidak mendukung Palestina bergabung dalam PBB. Ungkapan yang dinyatakan negara adidaya seperti Amerika Serikat, tentu saja akan dapat mempengaruhi negara lain.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama memperingatkan perdamaian Timur Tengah tidak bisa diwujudkan dengan mengambil jalan pintas. Dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York hari Rabu 21 September 2011 Obama mengatakan rakyat Palestina berhak mendirikan negara, namun itu harus dilakukan melalui dialog dengan Israel.<sup>13</sup>Obama pun bersikeras bahwa pendekatan ini akan merusak kemungkinan pembentukan sebuah negara Palestina dengan mengabaikan isu-isu yang belum terselesaikan dengan Israel. AS menilai, Palestina sudah mengabaikan upaya solusi dua negara dengan meminta pengakuan secara sepihak (unilateral) ke PBB.

Diplomat-diplomat Amerika pun berusaha keras untuk mencegah Palestina mencari dukungan di PBB. Mereka pun mendesak agar Palestina kembali melakukan pembicaraan dengan Israel. Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan Palestina telah salah perhitungan dalam mengambil langkah ini. Dia mengatakan bahwa pengakuan PBB tidak akan membawa mereka

---

<sup>13</sup> AS akan memveto upaya Palestina di dalam PBB "[http://www. bbo.co. uk/indonesia/ dunia/ 2011/09/ 110921 obama palestina.html](http://www.bbo.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110921_obama_palestina.html), diakses 21 September 2012

kepada kemerdekaan sejati dan situasi di lapangan tidak akan berubah.<sup>14</sup>

Unsur kedua adalah force, Amerika Serikat dapat dikatakan mampu mengaktualisasikan kepentingannya karena posisinya dihirarki internasional yang signifikan. Amerika Serikat tidak segan-segan menggunakan setiap kekuatannya (force) yang ada untuk mendukung isu-isu yang akan semakin menguntungkan posisinya pun menentang setiap isu internasional yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Wujud force yang dilakukan Amerika Serikat adalah melalui keputusan yang diambil oleh Komite Hubungan Luar Negri parlemen AS dan senat, dana bantuan pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintahan Palestina langsung dibekukan. Kondisi ini menyebabkan proyek senilai US\$55 juta dan US\$26 juta menjadi terbengkalai. Bahkan dana fasilitas kesehatan bernilai US\$ 85 juta di bekukan juga. Bentuk Force lainnya adalah dengan mengurangi bantuannya di UNESCO sebesar US\$ 60 juta sebagai wujud penentangangan Amerika Serikat terhadap keanggotaan Palestina di UNESCO dan tidak membayar iuran negara anggota pertahun 2012. Padahal jumlah tersebut merupakan 22 persen dari anggaran UNESCO.<sup>15</sup>

Unsur power ketiga yaitu kewenangan (authority) dilakukan dengan menggunakan hak veto. Hak Veto adalah hak yang di berikan PBB kepada 5 negara pemenang Perang Dunia II yaitu, AS, Rusia, China, Perancis dan Inggris berdasarkan Pasal 27 Piagam PBB untuk mengafirmasi keputusan yang dihasilkan oleh PBB.<sup>16</sup> PBB menetapkan negara-negara tersebut sebagai anggota Dewan Keamanan tetap.

Amerika Serikat adalah negara pemenang perang, membuatnya ditetapkan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang membuatnya memiliki hak khusus (hak veto) untuk

---

<sup>14</sup> Nugraha, Fajar, "Palestina ke PBB, Obama Mimpi Buruk", dalam <http://international.okezone.com/read/2011/09/19/414/504256/palestina-ke-pbb-obama-mimpiburuk>, diakses tanggal 19 september 2012.

<sup>15</sup> "Pembekuan Dana Palestina Masuk PBB," dalam <http://BBC.indonesiacom/dunia/4031/pembekuan-dana-palestina-masuk-pbb.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2012.

<sup>16</sup> apa itu hak veto" dalam <http://rvww.adipedia.com/2010/06/apa-itu-hak-veto-dan-mengapahanya.html>di akses 1 desember 2012

menentang keputusan PBB yang tidak sesuai dengan kepentingan negaranya. Setiap keputusan yang akan diambil PBB akan pasti selalu gagal jika Amerika Serikat memveto keputusan yang dibuat. Ancaman veto merupakan senjata terampuh Amerika Serikat dalam mempengaruhi kebijakan internasional yang di ambil oleh Dewan Keamanan PBB.

Amerika Serikat secara terang terangan menentang dan mengancam akan memveto jika Palestina meminta dukungan penuh DK PBB. Amerika di dunia internasional menyatakan akan mengagalkan upaya Palestina untuk bergabung menjadi anggota PBB dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Melalui jubah Amerika Serikat, Victor Nuland Amerika Serikat menentang langkah-langkah Palestina, yang berusaha mendirikan sebuah negara, yang hanya dapat dilakukan dengan negoisasi di New York dan Amerika Serikat akan memveto kebijakan tersebut.<sup>17</sup>

Amerika Serikat terlihat bersemangat menggunakan instrumen politik untuk menghentikan upaya Palestina untuk diakui existensinya sebagai sebuah negara. Amerika Serikat menjadi penghalang terbesar langkah Palesina untuk bergabung menjadi anggota tetap PBB. Penolakan Amerika Serikat berarti adalah penolakan dunia sebagai jawaban keinginan Palestina untuk memiliki status atas wilayahnya. Amerika serikat nampaknya terus berusaha untuk mencegah bergabungnya Palestina menjadi anggota tetap PBB.

#### **D. Hipotesa**

Upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk menghambat bergabungnya Palestina kedalam PBB adalah dengan menggunakan Pengaruh (influence), kekuatan (force) dan kewenangan (authority) yang di milikinya.

#### **E. Metode Penelitian**

---

<sup>17</sup> "BakalVeto Upaya Palestina Masuk PBB," dalam <http://forum.kompas.com/internasional/40616bakal-veto-upaya-palestina-masuk-pbb.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2012.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Azwar bahwa penelitian eksplanatif merupakan bentuk penelitian yang menerangkan atau menjelaskan kejadian yang ada melalui data yang diperoleh.<sup>18</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara studi pustaka dan data sekunder dengan cara memperoleh data melalui dokumen, buku, diktat, makalah dan observasi melalui internet yang digunakan sebagai acuan dan kerangka pedoman teori untuk mengkaji masalah yang diteliti.

### **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk menghambat bergabungnya Palestina dalam keanggotaan PBB.

### **H. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dilakukan dengan maksud agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, dan juga agar permasalahan yang dikaji tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan sebelumnya dan menghindari terjadinya penyimpangan. Dengan ditetapkannya jangkauan penelitian, maka akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kekaburan serta ketidakjelasan wilayah persoalan.

Sesuai dengan tema dan melihat permasalahan yang ada, fokus kajian akan ditekankan pada periode 2011-2012. Tahun 2011 karena pada tahun tersebut Palestina menyatakan ingin bergabung menjadi anggota PBB. Dipilihnya tahun 2012 agar diperoleh data-data terbaru.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan, maka tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2000.

## **BAB I.**

Berisi pendahuluan, yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II.**

Menguraikan tentang deskripsi sikap Amerika Serikat terhadap konflik Palestina dan Israel.

## **BAB III.**

Menjelaskan tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh Palestina untuk menjadi anggota PBB.

## **BAB IV.**

Menguraikan tentang pengaruh (influence), kekuatan (force), serta paksaan (authority) serta penggalangan dukungan anggota PBB yang dilakukan Amerika Serikat sebagai upaya untuk menghambat Palestina menjadi anggota PBB.

## **BAB V. KESIMPULAN**

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini.